KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL

Oleh

Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum
Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
Rudy, S.H., LLM., LLD.
Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D
Dr. Yusnani H, S.H., M.H.
Dr. Chandra Perbawati, S.H., M.H

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG 2020

PENGERTIAN POLITIK HUKUM NASIONAL



Kebijakan dasar dari negara mengenai bidang hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan untuk mencapai tujuan negara.

UNSUR POLITIK HUKUM NASIONAL



Kebijakan dasar negara hukum yang akan dibentuk Hukum yang akan ditegakkan Mencapai tujuan negara.

Lingkup Politik Hukum Nasional

Politik Pembentukan Hukum Politik Penegakan Hukum

TUJUAN POLITIK HUKUM NASIONAL

Sarana menciptakan sistem hukum nasional

Cita-cita Bangsa Indonesia

KERANGKA DASAR POLITIK HUKUM NASIONAL (PHN)

- 1. PHN MENGARAH PADA CITA-CITA BANGSA YAKNI MASYARAKAT YANG ADIL DAN MAKMUR BERDASARKAN PANCASILA
- 2. PHN DITUJUKAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN NEGARA, YAKNI:
 - A. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH INDONESIA
 - **B. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM**
 - C. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA

- D. MELAKSANAKAN KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, PERDAMAIAN ABADI, DAN KEADILAN SOSIAL
- 3. POLITIK HUKUM NASIONAL HARUS DIPANDU
 OLEH NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR
 NEGARA YAKNI:
 - A. BERBASIS MORAL AGAMA
 - B. MENGHARGAI DAN MELINDUNGI HAK-HAK ASASI MANUSIA TANPA DISKRIMINASI
 - C. MEMPERSATUKAN SELURUH UNSUR BANGSA DENGAN SEMUA IKATAN PRIMORDIALNYA

- D. MELETAKKAN KEKUASAAN DI BAWAH KEKUASAAN RAKYAT
- E. MEMBANGUN KEADILAN SOSIAL
- 4. PHN DIPANDU OLEH KEHARUSAN UNTUK:
 - A. MELINDUNGI SEMUA UNSUR BANGSA DEMI INTEGRASI ATAU KEUTUHAN BANGSA YG MENCAKUP IDEOLOGI DAN TERITORI.
 - B. MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DALAM EKONOMI DAN KEMASYARAKATAN
 - C. MEWUJUDKAN DEMOKRASI (KEADILAN SOSIAL)
 DAN NOMOKRASI (KEDAULATAN HUKUM)

- D. MENCIPTAKAN TOLERANSI HIDUP BERAGAMA
 BERDASAR KEADABAN DAN KEMANUSIAAN
- 5. SISTEM HUKUM NASIONAL YG HARUS
 DIBANGUN ADALAH SISTEM HUKUM PANCASILA
 YAKNI SISTEM HUKUM YG MENGAMBIL ATAU
 MEMADUKAN BERBAGAI NILAI KEPENTINGAN,
 NILAI SOSIAL, DAN KONSEP KEADILAN KE
 DALAM SATU IKATAN HUKUM PRISMATIK
 DENGAN MENGAMBIL UNSUR-UNSUR BAIKNYA

PHN MEMPERTEMUKAN 3 SISTEM NILAWAN AND ALAM HUBUNGAN KESEIMBANGAN:

- A. KESEIMBANGAN ANTARA INDIVIDUALISME DAN KOLEKTIVISME
- B. KESEIMBANGAN ANTARA RECHTSTAAT DAN THE RULE OF LAW
- C. KESEIMBANGAN ANTARA HUKUM SEBAGAI ALAT UNTUK MEMAJUKAN DAN HUKUM SEBAGAI CERMIN NILAI-NILAI YG HIDUP DI DALAM MASYARAKAT
- D. KESEIMBANGAN ANTARA NEGARA AGAMA DAN NEGARA SEKULER (THEO-DEMOKRATIS) ATAU RELIGIOUS NATION STATE

POLITIK HUKUM NASIONAL DAN PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA

Pancasila sebagai paradigma orientasi (arah) dalam pembangunan hukum

Konstitusi sebagai hukum dasar dan tertinggi sehingga merupakan politik hukum tertinggi

> Keduanya menjadi rujukan atau kaidah penuntun dalam pembangunan hukum nasional

